



# **LAPORAN**

## **PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL**

### **PEMBANGUNAN SISTEM REVU APIP BERBASIS WEB**

### **INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

### **DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KINERJA**

**NAMA : Drs. MUHAMAD NUR, ME**  
**N I P : 19700305 199303 1 001**  
**KELAS : A**  
**N D H : 02**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II**  
**TAHUN 2019**

## EXECUTIVE SUMMARY

Salah satu tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah melakukan Reviu Laporan Kinerja di Lingkup Kementerian Dalam Negeri, pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja dilakukan di dasarkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja dilakukan satu kali dalam satu tahun yang hasil dari Reviu Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri di serahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi untuk dinilai. Hasil penilaian kinerja yang di dapatkan oleh Kementerian Dalam Negeri selama lima tahun dari tahun 2013 s.d 2017 adalah nilai "B".

Proyek perubahan yang telah dilaksanakan adalah bertujuan untuk meningkatkan nilai kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menjadi "A" atau "AA". Pembuatan Sistem Reviu Laporan Kinerja berbasis WEB ini akan memudahkan bagi Inspektorat Jenderal ataupun *Stakeholder* didalam pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja dan akan berdampak dengan hasil penilaian kinerja yang akan diperoleh Kementerian Dalam Negeri. Pembuatan Draft desain Sistem Aplikasi Reviu Laporan Kinerja telah disusun selama pelaksanaan proyek perubahan, dengan beberapa draft yang telah disusun antara lain : (1) Draft SK Tim Pembangunan Sistem Reviu Laporan Kinerja; (2) Draft Permendagri Sistem Aplikasi Reviu Laporan Kinerja; (3) Draft Kontrak Kerja Pembangunan Sistem Reviu Laporan Kinerja; (4) Nota Dinas Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019; (5) Nota Dinas Permohonan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Implementasi dari proyek perubahan ini dilanjutkan tahun depan dengan fokus pembangunan aplikasi Reviu Laporan Kinerja agar aplikasi tersebut dapat segera di sosialisasikan dan dapat di *Launcing* untuk dapat digunakan oleh para *Stakeholders*. Harapan dengan adanya aplikasi ini adalah memudahkan bagi Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan Reviu Laporan Kinerja dan juga dapat menjadi *Control* bagi Menteri Dalam Negeri dalam melihat kinerja di satuan kerja setiap saat.